

# YAYASAN PENGAJIAN AL-QUR'AN DAN HADITS (YAPQAH)

Alamat : Ereng-ereng Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng Sul sel 92461 Indonesia

## SURAT KEPUTUSAN

No : E - 07/YAPQAH/E/VII/1995

### TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN TINGKAT MADRASAH IBTIDAIYAH  
PADA PONDOK PESANTREN AL-FURQAN-YAPQAH CABANG PATTALLASSANG  
DESA. JENETALLASSA KEC. RUMBIA KAB. JENEPONTO

- I. MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
3. Anggaran dasar YAPQAH Bab V pasal 5 ayat 1 Tentang Pendidikan
- II. MENIMBANG : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan peran pesantren dalam bidang Pendidikan khususnya Pendidikan Agama dan Da'wah, maka perlu segera didirikan Pendidikan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah di Desa. Jenetallassa Kec. Rumbia Kab. Jeneponto.  
b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan YAPQAH

### MEMUTUSKAN

#### III. MENETAPKAN

- Pertama : Mendirikan Pendidikan **TINGKAT IBTIDAIYAH** pada Pondok Pesantren Al-Furqan Cabang Pattallassang Desa. Jenetallassa Kec. Rumbia Kab. Jeneponto
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari dianggap perlu.

#### IV. INTAHAA

**Ditetapkan di : Ereng-ereng**  
**Pada Tanggal : 01 Juli 1995**

Pengurus Yapqah

Ketua : KH. Muh. Nuh. Khaeruddin

Sekretaris : Drs. M. Basri Samad



#### Tembusan :

1. Yth Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jeneponto
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Jeneponto
3. Yth Kepala Camat Rumbia
4. Yth Kepala Desa Jenetallassa Kec. Rumbia Kab. Jeneponto
5. Arsif



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 125 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MIS AL-FURQAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional MIS AL-FURQAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan...

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dari Yayasan Pengkajian Al-Quran dan Hadist (YAPQAH) Nomor : E-36/YAPQAH/E/X/2019 Tanggal 25 Oktober 2019;
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Yayasan Pengkajian Al-Quran dan Hadist (YAPQAH);
  3. Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto Nomor : B-1492/Kk.21.07/2/PP.00/11/2019 Tanggal 08 Nopember 2019;

**MEMUTUSKAN :**

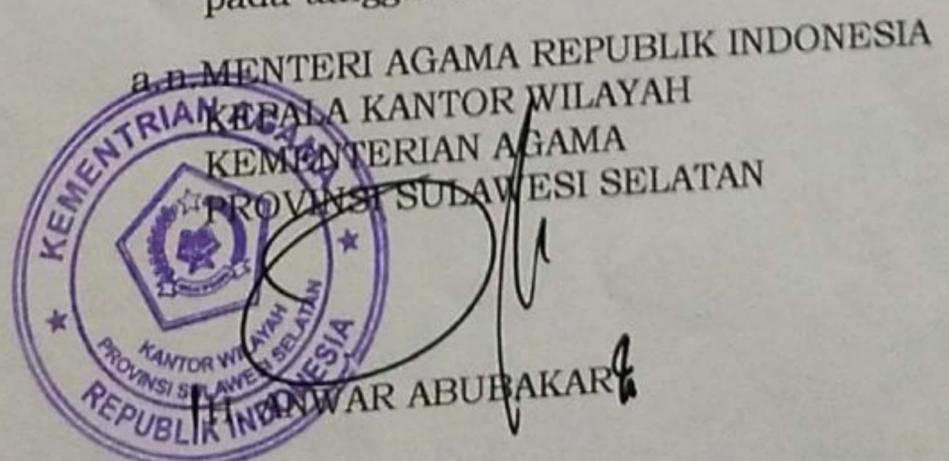
Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MIS AL-FURQAN.**

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 31 Januari 2020



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 125 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL MIS AL-FURQAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	MIS AL-FURQAN
2	Nomor Statistik Madrasah	111273040009
3	Alamat Madrasah	Jalan Pattalassang Desa/Kelurahan Jenetallasa Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
4	Nama Organisasi penyelenggara	Yayasan Pengkajian Al-Quran dan Hadist (YAPQAH)
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 34 Dudi Jufri, SH, M.Kn Tanggal 23 Agustus 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : AHU-0033074.AH.01.04.2016 Tanggal 23 Agustus 2016

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



H. ANWAR ABUBAKAR